



**BADAN PENAGGULANGAN
BENCANA DAERAH**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, Laporan Kinerja Instansi (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, 2 Februari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19820929 201406 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2025 – 2030.

Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masyarakat yang terdampak bencana yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut.

Dalam pencapaian target kinerja BPBD Kab. Tanah Laut harus memberikan layanan secara prima. Adapun beberapa kegiatan yang mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut :

- Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana yang ada di Kab. Tanah Laut.
- Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelatihan keluarga tanggap bencana alam.
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Pelaksanaan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi mitigasi bencana kepada seluruh warga/masyarakat/kelompok masyarakat yang berada di daerah rawan bencana di Kab. Tanah Laut.
- Pemberian bantuan logistik bagi masyarakat yang terkena bencana.
- Pelatihan Pelaksanaan pelatihan Potensi SAR Pertolongan di Gunung Hutan (Jungle Rescue) dan Pelatihan pemadaman api di atas kapal laut.
- Penetapan status tanggap darurat pada tahun 2025 berdasarkan kaji cepat dan penyaluran bantuan logistik pada korban bencana yang terdampak pada tahun

2025 berupa kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa penanganan bencana.

- Penyusunan dokumen kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Koordinasi Pemulihan Pasca Bencana yang terjadi di Tahun 2024.

Demikian dengan disusunnya LAPKIN ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut di masa yang akan datang.

Pelaihari, 2 Februari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19820929 201406 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum.....	2
D. Cascading Kinerja.....	3
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	7
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	10
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi RPJMD	14
B. Misi RPJMD	15
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	15
D. Strategi dan Arah Kebijakan	18
E. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja	23
B. Akuntabilitas Keuangan	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	49
LAMPIRAN	
Capaian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
SK Indikator Kinerja Utama	
Rencana Aksi Tahun 2025	
Pohon Kinerja	
Cascading Kinerja	
LHE AKIP tahun 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Isu Strategis BPBD Kab. Tanah Laut.....	8
Tabel 2. Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025	10
Tabel 3. Program, Kegiatan dan Pagu BPBD Kab. Tanah Laut 2025	11
Tabel 4. Rekomendasi APIP dan Rencana Tindak Lanjut Terhadap Hasil Evaluasi SAKIP 2025	12
Tabel 5. Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran BPBD Kab. Tanah Laut ...	17
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama BPBD.....	18
Tabel 7. Analisis Arah Kebijakan	19
Tabel 8. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025	21
Tabel 9. Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025	21
Tabel 10. Pengelompokan Capaian Kinerja.....	24
Tabel 11. Rumus Pengukuran Capaian Kinerja.....	25
Tabel 12. Capaian Kinerja Terhadap Target 2025.....	25
Tabel 13. Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	26
Tabel 14. Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Tanah Laut dengan PD Lain..	26
Tabel 15. Realisasi Keuangan Sasaran Strategis.....	27
Tabel 16. Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025	33
Tabel 17. Nilai Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana.....	37
Tabel 18. Realisasi Belanja Pegawai 2025.....	41
Tabel 19. Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2025	41
Tabel 20. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Proses Bisnis BPBD Kab. Tanah Laut.....	4
Gambar 2. Struktur Organisasi BPBD Kab. Tanah Laut	4
Gambar 3. Persentasi SDM BPBD Kab. Tanah Laut.....	10
Gambar 4. Grafik IKD Tahun 2023-2025 Provinsi Kalimantan Selatan	26
Gambar 5. Sosialisasi SPAB.....	28
Gambar 6. Penguatan Kapasitas Kawasan Bencana	31
Gambar 7. Pelaksanaan Apel Siapsiaga dan Simulasi Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	32
Gambar 8. Penanganan Bencana Banjir Tahun 2025	34
Gambar 9. Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana	35
Gambar 10. Pelaksananaan Pendataan Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana.	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di masa yang akan datang.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

D. Cascading Kinerja

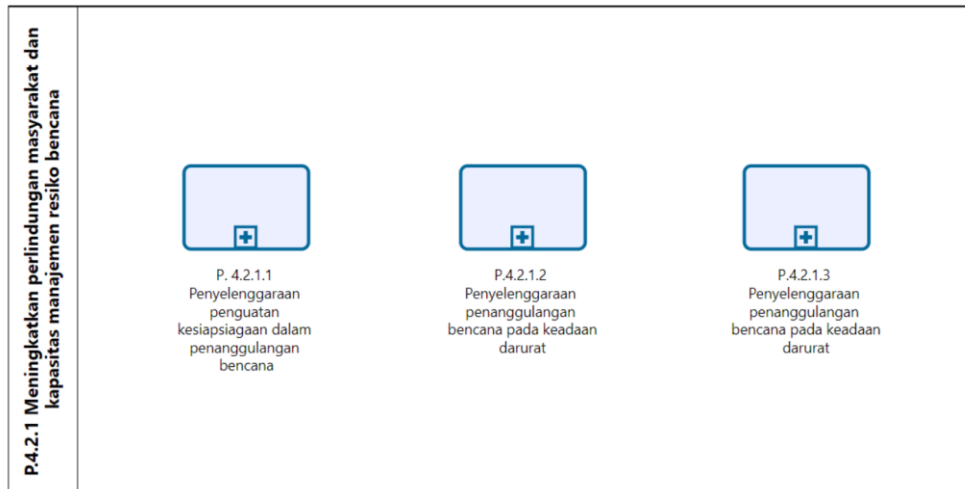
Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

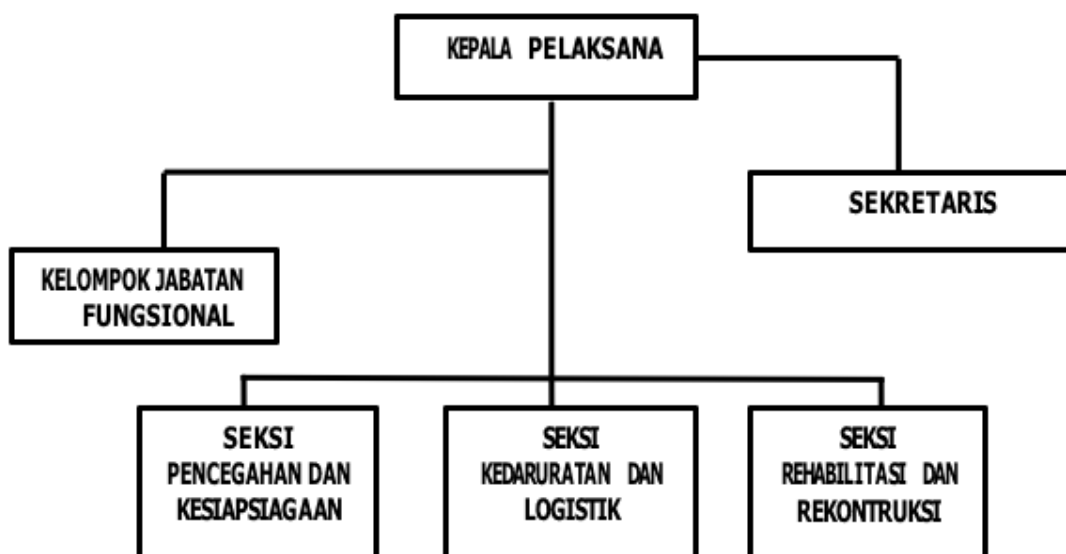
Gambar 1. Peta Proses Bisnis BPBD Kab. Tanah Laut



2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi BPBD Kab. Tanah Laut



BPBD Kabupaten Tanah Laut merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi BPBD terdiri dari Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris Badan, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kasi Kedaruratan dan Logistik, Kasi rehabilitasi dan Rekonstruksi. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing masing jabatan tersebut adalah :

1. Kepala Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya;
- b. merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pembinaan teknis penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan kemitraan dalam peningkatan penanganan penanggulangan bencana;
- e. membina, mengawasi dan mengendalikan program penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan prundang-undangan;
- f. membuat laporan kinerja bidang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi Sekreatariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan urusan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - h. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.
3. Seksi Mitigasi Bencana dalam menjalankan tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
 - c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
 - d. Pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - e. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - f. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
 - g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan resiko bencana; dan
 - h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana.
4. Seksi Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana. Seksi kedaruratan bencana dan Operasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;

- c. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
 - d. Pengkoordinasian operasional penanggulangan bencana;
 - e. Penyelenggaraan analisis dan pengkoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
 - f. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
 - g. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat; dan
 - h. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian sistem komunikasi kebencanaan; dan
 - i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana.
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi. Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja rehabilitasi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi;
 - c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rehabilitasi;
 - d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
 - e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja rehabilitasi

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan isu strategis sesuai lingkungan dinamis yaitu isu global, nasional (BNPB), dan regional (BPBD Provinsi Kalimantan Selatan) yang dapat mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun isu strategis BPBD Kab. Tanah Laut dapat dilihat dalam tabel analisis sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Isu Strategis BPBD Kab. Tanah Laut

PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Banyak perumahan dan pemukiman yang ada di daerah rawan bencana.	Tingginya Indek Risiko Bencana	Pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan	Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi	Belum Optimal nya atau makisimalnya kapasitas penanggulangan bencana di daerah	Penyusunan Kebijakan terkait relokasi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana sesuai dengan tata ruang kawasan.
Kurangnya komitmen dan masih rendahnya kapasitas pemangku kepentingan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana	Tingginya Indek Risiko Bencana		Kebutuhan Penguatan Kepemimpinan dan Peran Strategis Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat Global	Belum Optimal nya atau makisimalnya kapasitas penanggulangan bencana di daerah	Meningkatkan kapasitas pelaku penanggulangan bencana di daerah termasuk unsur pimpinan daerah.
Aktivitas masyarakat serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan justru menaikkan risiko Bencana	Tingginya Indek Risiko Bencana		Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi		Memperhatikan pemberian izin pembangunan dan investasi pengelolaan tata ruang kawasan serta penguatan konstruksi di daerah beresiko bencana.
Belum optimalnya Pentahelix kebencanaan (pemerintah, media, dunia usaha, masyarakat, dan akademisi) dalam usaha penanggulangan bencana	Tingginya Indek Risiko Bencana		Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak	Belum Optimal nya atau makisimalnya kapasitas penanggulanga bencana di daerah	Kerjasama multipihak dalam bentuk kemitraan pengetahuan, pemanfaatan teknologi, pendanaan, termasuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
Masih kurangnya jumlah sumberdaya yang dimiliki pemerintah untuk melayani seluruh wilayah rawan bencana.	Tingginya Indek Risiko Bencana		Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak	Kualitas dan Kuantitas SDM Penanggulangan Bencana Masih Rendah	Menyiapkan anggaran penanggulangan bencana di daerah untuk memberikan layanan kebencanaan kepada masyarakat Sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan
Program dan kegiatan Penanggulanagn Bencana oleh perangkat daerah lebih terfokus pada upaya tanggap darurat	Tingginya Indek Risiko Bencana		Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten yang melingkupi, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan dan pasca bencana.

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

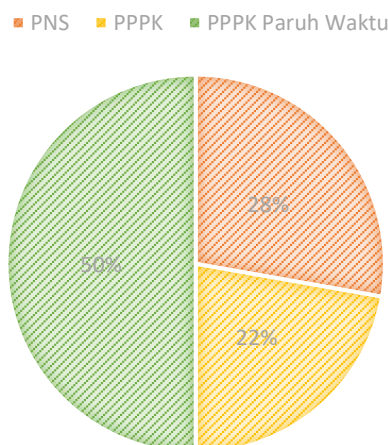
Jumlah ASN pada BPBD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK Golongan			PPPK Paruh Waktu			Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I	IX	VII	V	IX	VII	V		S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
	9	6	-	1	1	10	5	3	19	54	1	11	6	-	36	-	-	54

Jumlah kebutuhan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peta jabatan adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) pegawai sehingga diperlukan tenaga non ASN untuk membantu pelaksanaan tugas agar BPBD dapat memberikan pelayanan secara prima dan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan disepakati dengan pimpinan.

Gambar 3. Persentasi SDM BPBD Kab. Tanah Laut



Berdasarkan pada table diatas terlihat bahwa terdapat 15 (lima belas) pegawai negeri sipil ditambah dengan 12 (dua belas) orang PPPK dan 27 (dua puluh tujuh) PPPK Paruh Waktu dengan dengan sebutan Tenaga Administrasi 6 (sembilan) orang, Rescuer 14 (Dua puluh lima) orang dan Pusdalops PB 3 (tiga) orang yang ditempatkan di dikantor induk BPBD dan 2 (tiga) orang di Kecamatan Kintap.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, BPBD Kab. Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana sebanyak 480 unit peralatan dan 1 unit gedung kantor. Peralatan khusus penanganan dan penanggulangan bencana terdapat sebanyak 291 unit peralatan termasuk kendaraan bermotor.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga didukung oleh anggaran yang cukup memadai yaitu sebesar Rp. 6.660.856.827,45 yang terbagi dalam 2 (dua) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Program, Kegiatan dan Pagu BPBD Kab. Tanah Laut 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.328.409.769,78
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.998.945,71
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.208.034.548,65
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.447.376,62
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	316.530.058,80
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.032.167.240,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.231.600,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.332.447.057,67
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	72.743.452,01
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	769.924.579,37
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	336.948.257,54
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	152.830.768,75
Jumlah		6.660.856.827,45

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/219/LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

Tabel 4. Rekomendasi APIP dan Rencana Tindak Lanjut Terhadap Hasil Evaluasi SAKIP 2025

No.	Komponen Kinerja	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Perencanaan Kinerja	Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya secara menyeluruh serta mendokumentasikan hasil analisis faktor pendukung dan penghambat, capaian hasil evaluasi tersebut harus dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya sehingga siklus manajemen kinerja berjalan secara berkesinambungan	Evaluasi akan dilaksanakan menggunakan aplikasi Simpun Tanah Laut.	1 Dokumen	Triwulan 3	Kepala Pelaksana	Selesai
		Memperhatikan konsistensi penetapan target kinerja pada seluruh dokumen perencanaan penetapan target harus didasarkan pada baseline trend capaian	Penetapan target kinerja telah dilakukan dan telah disepakati bersama.	1 Dokumen	Triwulan 2	Sekretaris	Selesai
		Melakukan analisis yang objektif agar target yang diterapkan bersifat smart selain itu perlu dibangun mekanisme pengendalian internal agar tidak terjadi perbedaan angka target pada dokumen yang berbeda untuk tahun sama	Perbedaan target karena adanya perbedaan dokumen yang dipakai antar perencanaan dan pelaporan. Setelah dokumen perencanaan lima tahunan akan mengacu pada dokumen yang telah ditetapkan	1 Dokumen	Triwulan 2	Sekretaris	Selesai
2	Pengukuran Kinerja	Melaksanakan evaluasi kinerja yang tidak hanya berfokus pada realisasi keuangan tetapi juga pada pencapaian hasil dari program atau kegiatan	Telah disusun laporan kinerja per triwulan setelah adanya persamaan persepsi antar SKPD dan TIM SAKIP Kabupaten.	4 Dokumen	Triwulan 3-4	Sekretaris	Selesai
		Pemanfaatan aplikasi e-kinerja untuk mendorong pimpinan memberikan umpan balik yang efektif komprehensif dalam penilaian SKP bulanan umpan balik sebaiknya berupa narasi analitis yang menjelaskan capaian kinerja pegawai hambatan yang dihadapi serta faktor pendukung keberhasilan dengan harapan memantau kinerja tidak hanya bersifat administratif tapi juga mampu menjadi sarana pembinaan kinerja bawahan	Akan dilaksanakan sosialisasi dalam pemberian feedback pada Aplikasi E-Kinerja	3 Dokumen	Triwulan 3	Seluruh Pejabat Struktural	Selesai

No.	Komponen Kinerja	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
3	Pelaporan Kinerja	Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu menyusun langkah perbaikan berupa evaluasi kinerja internal secara berkala untuk meningkatkan capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan khususnya persentase peningkatan jumlah desa tanggung bencana dan persentase SDM TRC BPBD yang tersertifikasi keahlian	Telah dilakukan perbaikan dengan adanya perubahan rincian belanja dan pola pelaksanaan kegiatan pada DPPA BPBD TA 2025 pada sub kegiatan pengembangan kapasitas RTC	1 Dokumen	Triwulan 2	Kepala Pelaksana	Selesai

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja BPBD Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra BPBD Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana BPBD bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh BPBD.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut
Simpun, Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari segenap unsur aparatur pemerintah di Lingkungan BPBD sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian BPBD diharapkan mampu menampilkan dirinya sebagai motor penggerak, sebagai koordinator perumusan kebijakan pemerintah daerah urusan kebencanaan, sehingga dapat bergerak cepat, penuh energi dan menghasilkan kebijakan yang akurat dan memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah serta mampu memberi dorongan yang kuat bagi semua perangkat daerah agar senantiasa bertenaga, mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang selalu bergerak maju menuju kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan BPBD Tanah

Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. BPBD menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama
Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk BPBD Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke:

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Rentsra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029

3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD, maka BPBD termasuk dalam mendukung tujuan kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan dengan sasaran yaitu Menurunnya Risiko Bencana. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Menurunnya Risiko Bencana adalah Indeks Risiko Bencana.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka BPBD menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis BPBD Tahun 2025-2029. Adapun tujuan BPBD adalah Menurunnya Risiko Bencana dan sasaran strategis BPBD adalah Terwujudnya Kualitas Ketahanan Daerah Atas Bencana.

Tabel 5. Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran BPBD Kab. Tanah Laut

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menurunnya Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	145,09	144	140	135	130	125	120
		Terwujudnya Kualitas Ketahanan Daerah Atas Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,65	0,67	0,67	0,68	0,68	0,69	0,7

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama BPBD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Terwujudnya Kualitas Ketahanan Daerah Atas Bencana	1 Indek Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan Upaya untuk mengukur kapasitas (ketahanan) penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Nilai Indeks Ketahanan Daerah berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Semakin tinggi nilai IKD, makin tinggi pula kapasitas yang dimiliki sebuah daerah dan otomatis menekan skor IRBI. IKD dihitung berdasarkan capaian 71 indikator ketahanan daerah pada 7 sektor.

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun (ini) ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Renstra BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kab. Tanah Laut dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kab. Tanah Laut.

Tabel 7. Analisis Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Terwujudnya kualitas ketahanan daerah atas bencana	Pemetaan Daerah Rawan Bencana dan Penguatan kawasan rawan bencana.	Menyusun Kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontijensi per Jenis Bencana dan disosialisasikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
			Memberikan penguatan kawasan dengan pendampingan menuju Kecamatan Tangguh Bencana dan/atau Desa Tangguh Bencana.
		Membangun sistem dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana yang handal	Melakukan sertifikasi keahlian penanggulangan bencana dan pencarian pertolongan dan evakuasi bagi aparaturnya penanggulangan bencana (Tim Reaksi Cepat).
			Melakukan peningkatan kapasitas bagi aparaturnya pemerintah dan relawan yang bertugas di daerah rawan bencana.
		Membangun sistem penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan elemen <i>Pentahelix</i> kebencanaan	Membangun jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam penanggulangan bencana, baik dari instansi pemerintah, swasta, akademisi, TNI/POLRI, maupun nasional dan internasional
			Mengaktifkan pos komando darurat pada saat keadaan darurat dan membagi tugas penanganan sesuai dengan klaster penanggulangan bencana.
		Menyelenggarakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Menyusun Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
			Melaksanakan koordinasi secara intens kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pemulihan pasca bencana.
			Merangkul pihak swasta untuk turut serta dalam melakukan pemenuhan kebutuhan pasca bencana.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Memastikan sistem kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja.	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan dan berlandaskan analisis oprasional NSPK serta skala prioritas.
			Pengukuran kinerja secara berkala dengan menggunakan teknologi informasi.
			Melakukan pelaporan secara berkala sesuai denga peraturan perundang- undangan.

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Kualitas Ketahanan Daerah Atas Bencana	1	Indek Ketahanan Daerah (IKD)	0,67	Kepala BPBD

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 6.660.856.827,45. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 9. Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kualitas Ketahanan Daerah Atas Bencana	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.328.409.769,78
		Program Penanggulangan bencana	1.332.447.057,67

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana, baik bencana alam, nonalam, maupun sosial. IKD menjadi alat evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam mengukur efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Pencapaian nilai IKD yang optimal diharapkan dapat mencerminkan kesiapan kelembagaan, kebijakan, serta kapasitas sumber daya daerah dalam membangun ketahanan yang menyeluruh.

IKD merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. IKD dihitung berdasarkan 71 indikator yang terdiri dari 7 prioritas dan 284 pertanyaan. Untuk mengisi IKD, diperlukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan, pembangunan, pekerjaan umum, pertanahan dan tata ruang, kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, lingkungan, kehutanan.

Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor B-51/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 hal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan bahwa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut pada tahun 2025 sebesar 0,44 adapun nilai tersebut diperoleh mulai dari selfassesmen oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan

pengisian kuesioner berbasis 7 parameter dan 71 indikator yang terstruktur, mengukur kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana melalui pertanyaan bertingkat (output dan outcome) menggunakan alat penilaian (tools) yang disediakan BNPB yaitu <http://inarisk.bnpb.go.id> kemudian dilakukan verifikasi bertahap oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan 1 (satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 1 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

Tabel 10. Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 11. Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya</i>	Realisasi ----- X 100%
	<i>jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i> Contoh: jumlah produksi partisipasi padi, angka murni.	Target
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100%
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Realisasi ----- X 100%
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya kualitas ketahanan daerah atas bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,54	0,51	0,65	0,67	0,44	65,67%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									

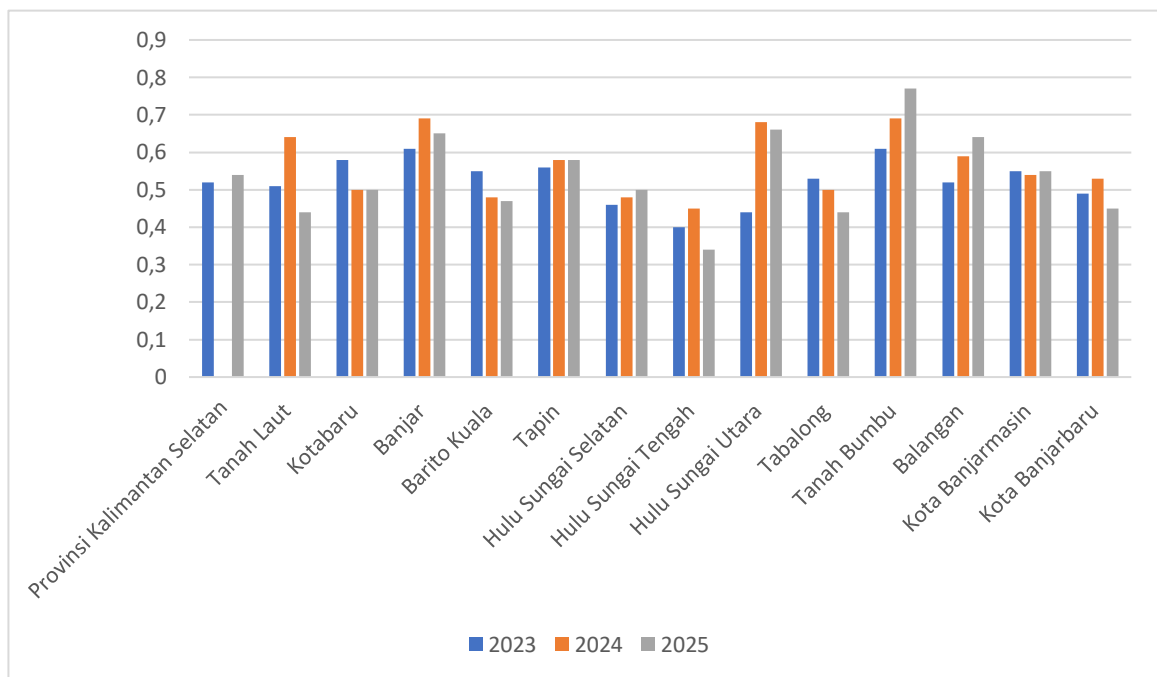
Dari table tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 0,21 atau sebesar 49,7 %. Persentasi capaian kinerja tahun 2025 (0,44) terhadap target kinerja pada tahun 2025 (0,67) adalah sebesar 65,67 %, sedangkan persentasi capaian kinerja tahun 2025 (0,44) terhadap target akhir restra (0,70) adalah sebesar 62,8 %.

Tabel 13. Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Terwujudnya kualitas ketahanan daerah atas bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,67	0,44	65,67%	0,7	62,8%

Adapun capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut tahun 2025 jika dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten lainnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Gambar 4. Grafik IKD Tahun 2023-2025 Provinsi Kalimantan Selatan



Tabel 14. Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut dengan PD Lain

Provinsi/Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
Provinsi Kalimantan Selatan	0,52	-	0,54
Tanah Laut	0,51	0,64	0,44
Kotabaru	0,58	0,5	0,5
Banjar	0,61	0,69	0,65
Barito Kuala	0,55	0,48	0,47
Tapin	0,56	0,58	0,58
Hulu Sungai Selatan	0,46	0,48	0,5
Hulu Sungai Tengah	0,4	0,45	0,34

Provinsi/Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
Hulu Sungai Utara	0,44	0,68	0,66
Tabalong	0,53	0,5	0,44
Tanah Bumbu	0,61	0,69	0,77
Balangan	0,52	0,59	0,64
Kota Banjarmasin	0,55	0,54	0,55
Kota Banjarbaru	0,49	0,53	0,45

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut berada pada urutan ke-12.

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Pelaksana BPBD Tahun 2025 di dukung melalui 2 Program yang terdiri atas 13 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 15. Realisasi Keuangan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.328.409.769,78	4.757.961.426,00	89,29%
		Program Penanggulangan bencana	1.332.447.057,67	895.045.691,00	67,17%
	J U M L A H		6.660.856.827,45	5.653.007.117,00	84,87%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada dalam mencapai target Indikator sasaran dengan hasil 65,67 % dalam kategori rendah dan anggaran yang terealisasi sebesar 84,87% sehingga terdapat efesiensi kinerja sebesar -29,24 %, dimana angka tersebut diperoleh dari Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian

Komponen kapasitas dihitung berdasarkan kaapasitas pemerintah daerah berdasarkan perangkat Penilaian Indeks Ketahan Daerah yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 Indikator. Berdasarkan keterisian terhadap 71 indikator Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengisi sebanyak 46 indikator. Pemenuhan 46 Indikator tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan

yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Tanah Laut beserta SKPD pengampu urusan kebencanaan, antara lain :

a. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana pada tahun 2025 melalui sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan bencana. Sosialisasi SPAB bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah dalam menghadapi bencana, melindungi fasilitas pendidikan, serta memastikan keberlangsungan proses belajar-mengajar meskipun terjadi bencana, melalui implementasi tiga pilar: sarana prasarana aman, manajemen risiko bencana, dan pendidikan kebencanaan yang komprehensif.

Gambar 5. Sosialisasi SPAB



Sosialisasi SPAB dilaksanakan di 9 titik sekolah antara lain Pesantren An-Najah Cindai Alus Putra Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang, Pesantren Rubath Riyadhus Sholihin Kecamatan Tambang Ulang, UPTD SDN 1 Batakan Kecamatan Panyipatan, UPTD SDN 1 Kintap Kecamatan Kintap, UPTD SDN Kurau Kecamatan Kurau, UPTD SDN Padang Kecamatan Bati-bati, UPTD SDN Panjaratan Kecamatan Pelaihari, UPTD SMPN 2 Bumi

Makmur Kecamatan Bumi Makmur, UPTD SDN Gunung Makmur Kecamatan Takisung, dengan jumlah peserta sebanyak 433 orang yang terdiri dari siswa sekolah, tenaga pendidik, perwakilan orang tua siswa, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah.

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah serangkaian upaya pra-bencana untuk mengurangi risiko dan mengantisipasi bencana melalui edukasi, sosialisasi, pelatihan (seperti simulasi), pengembangan sistem peringatan dini, pemetaan risiko, pembinaan masyarakat siaga bencana (DESTANA), serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam menghadapi ancaman bencana secara terpadu dan efektif sebelum bencana terjadi.

Pada tahun 2025 BPBD Kab. Tanah Laut melaksanakan serangkaian kegiatan antara lain :

- Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diawali dengan analisis risiko bencana yang mencakup identifikasi ancaman, tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah. Berdasarkan hasil analisis risiko, ditetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Sinkronisasi dengan RPJMD dan dokumen sektoral menjadi kunci agar RPB dapat diimplementasikan secara efektif. Rencana aksi disusun untuk setiap tahapan bencana (pra, saat, dan pascabencana), termasuk penetapan program, kegiatan, dan indikator kinerja. RPB menetapkan peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, termasuk mekanisme koordinasi lintas sektor. Penyusunan RPB melibatkan perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang diselenggarakan secara daring.

- Pelaksanaan penyusunan Kajian Rencana Kontinjensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi kejadian darurat kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Penyusunan rencana kontinjensi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi skenario terburuk bencana karhutla. Penyusunan kajian diawali dengan identifikasi dan analisis risiko kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemetaan wilayah rawan, kondisi iklim dan cuaca, karakteristik lahan, serta riwayat kejadian karhutla. Analisis tersebut menjadi dasar dalam penentuan skenario kejadian darurat dan kebutuhan penanganan. Selanjutnya dilakukan penyusunan skenario kontinjensi, yang menggambarkan kemungkinan perkembangan kejadian kebakaran hutan dan lahan, dampak yang ditimbulkan, serta kebutuhan sumber daya pada kondisi darurat. Pada tahap ini ditetapkan asumsi kejadian, wilayah terdampak, jumlah penduduk berisiko, serta kebutuhan personel, peralatan, dan logistik. Dalam rangka mendukung efektivitas penanganan, kajian rencana kontinjensi juga memuat pembagian peran dan tanggung jawab lintas sektor, termasuk BPBD, perangkat daerah terkait, TNI/Polri, instansi vertikal, dunia usaha, serta unsur masyarakat.

Mekanisme komando, koordinasi, dan komunikasi darurat dirumuskan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan saat tanggap darurat. Penyusunan kajian dilaksanakan melalui forum koordinasi dan konsultasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait guna memastikan keselarasan, keterpaduan, dan kesiapan pelaksanaan rencana. Masukan dari hasil koordinasi digunakan untuk penyempurnaan dokumen rencana kontinjensi. Sebagai tahap akhir, dokumen kajian rencana kontinjensi kebakaran hutan dan lahan

difinalisasi dan ditetapkan sebagai acuan kesiapsiagaan dan penanganan darurat. Dokumen ini menjadi pedoman operasional dalam menghadapi bencana karhutla dan dapat ditindaklanjuti melalui sosialisasi, pelatihan, serta simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.

- Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan dibagi 2 sesi. Pada sesi pertama dengan tema Penyusunan Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana dan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko.

Gambar 6. Penguatan Kapasitas Kawasan Bencana



Pelaksanaa pada tanggal 25 Februari 2025 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Takisung dan pada tanggal 26 Februari 2025 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tambang Ulang. Pada sesi kedua dengan tema Pembentukan Relawan PB, Pengkajian Risiko Bencana, Manajemen Risiko, Pengurangan Kerentanan. Pelaksanaa pada tanggal 22 April 2025 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Takisung dan pada tanggal 29 April 2025 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tambang Ulang.

- Melaksanakan Apel Siap Siaga Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sekaligus simulasi penangan bersama TNI, POLRI, TRC BPBD, Satpolpp dan Damkar, Manggala Akni, Rescuer Perusahaan Swasta, Relawan yang ada di seluruh Kab. Tanah Laut pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 447 orang

Gambar 7. Pelaksanaan Apel Siapsiaga dan Simulasi Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana (KATANA) dilaksanakan 2 sesi, sesi pertama dengan tema Pengenalan Bencana yang Sering Terjadi di Rumah dan sesi kedua dengan tema Latihan Penyelamatan dan Penanganan Bencana Kebakaran Rumah. Katana dilaksanakan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kurau pada tanggal 8-9 Juli 2025, Kecamatan Takisung pada tanggal 10-11 Juli 2025, Kecamatan Jorong pada tanggal 16-17 Juli 2025 dengan peserta anggota PKK Kecamatan/Desa, ibu rumah tangga yang padat penduduk dengan total peserta sebanyak 48 orang.
 - Pelatihan Mitigasi Bencana dalam rangka membangun sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini pada 2 tempat yaitu kecamatan Jorong pada tanggal 24-25 November 2025 dan Kecamatan Tambang Ulang pada tanggal 26-27 November 2025 dengan total peserta sebanyak 59 orang.
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pada Tahun 2025 telah terjadi sebanyak 88 kejadian bencana berupa banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan abrasi. Adapun rekap kejadian bencana sebagai berikut :

Tabel 16. Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

Jenis Kejadian	Kecamatan											
	Bajuin	Bati-Bati	Batu Ampar	Bumi Makmur	Jorong	Kintap	Kurau	Panyipatan	Pelaihari	Takisung	Tambang Ulang	Grand Total
Banjir	1	2	-	1	-	1	1	2	4	1	1	14
Cuaca Ekstrem	2	-	1	2	1	1	3	-	9	1	3	23
Kebakaran Gedung dan Pemukiman	-	5	-	-	1	5	1	-	7	4	-	23
Pencarian Dan Pertolongan	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	6
Kebakaran Hutan dan Lahan	1	8	-	1	1	3	-	3	1	1	1	20
Gelombang Pasang	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
Grand Total	4	15	1	4	3	12	5	6	25	8	5	88

Pemerintah Kab. Tanah Laut menetapkan 2 status siaga bencana selama tahun 2025 yaitu Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Penetapan status siaga bencana hidrometeorologi basah berdasarkan kaji cepat di wilayah kecamatan Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, Takisung, Panyipatan dan Tambang Ulang berdasarkan kejadian yang terjadi di akhir bulan desember 2024 dan status siaga darurat ditetapkan sampaidengan bulan maret 2025.

Penanganan bencana banjir di Kecamatan Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, dan Tambang Ulang dengan melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap korban terdampak. Melalkukan aktivasi pos lapangan penanganan banjir di kecamatan kurau dan kecamatan bati-bati. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melakukan penyaluran logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana serta membuka dapur umum.

Gambar 8. Penanganan Bencana Banjir Tahun 2025



Penetapan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan ini diawali dengan pelaksanaan respon cepat oleh Tim Reaksi Cepat BPBD Kab. Tanah Laut yang outputnya adalah Kaji Cepat Bencana. Laporan Kaji Cepat Bencana kemudian di sampaikan pada Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Kepala SKPD terkait untuk memutuskan apakah akan ditetapkan status darurat. Setelah penetapan status siaga darurat maka dilakukan aktivasi komando penanganan bencana dengan mengaktifkan pos komando dan pos lapangan. Pos Komando (Posko) adalah pusat komando untuk perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi operasi penanganan bencana, sementara Pos Lapangan (Poskolap) adalah unit pelaksana teknis di lokasi bencana yang bertugas langsung melaksanakan tugas di lapangan seperti pencarian, penyelamatan, evakuasi, pemberian bantuan dasar, dan perbaikan infrastruktur vital, di bawah komando Posko.

BPBD Kab. Tanah Laut membentuk Tim Reaksi Cepat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat yang beranggotakan 55 orang. Tim Reaksi Cepat tersebut bertugas melakukan monitoring terhadap daerah rawan bencana, melakukan kaji cepat bencana, melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap korban bencana. BPBD Kab. Tanah Laut

melakukan pelatihan secara berkala kepada Anggota Tim Reaksi Cepat seperti water rescue, vertikal rescue dan jungle rescue.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menetapkan Kebutuhan Logistik (Standart Minimal Logistik) sesuai dengan petunjuk teknis BNPB terkait standart minimal kebutuhan logistik dan peralatan. Penetapan standart minimal logistik tersebut telah di bahas dan disepakati oleh SKPD pemangku logistik dan peralatan kebencanaan dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (PSDPB) adalah upaya sistematis untuk membangun kapasitas nasional dan daerah dalam mengelola risiko bencana melalui kerangka hukum kuat (UU No. 24/2007) dan tahapan manajemen bencana (prabencana, tanggap darurat, pascabencana), yang mencakup integrasi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh terhadap bencana. Dalam rangka membangun kapasitas dengan melibatkan pemangku berbagai kepentingan BPBD kab. Tanah Laut melaksanakan kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber yang bersertifikat keahlian manajemen bencana untuk menjelaskan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan pasca bencana terkhusus terkait rehabilitasi dan rekonstruksi. Peserta yang hadir sebanyak 47 orang berasal dari perwakilan perusahaan swasta yang melaksanakan usahanya di daerah Kabupaten Tanah Laut. Selain dari perusahaan swasta peserta juga berasal dari tokoh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana untuk bisa bekerja sama dalam melaksanakan penanganan bencana sehingga tercipta percepatan dalam penanganan bencana.

BPBD Kab. Tanah Laut juga melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi bencana yang mana diharapkan nantinya melalui forum komunikasi yang dibentuk antara pemerintah dan masyarakat dapat bertukar informasi sehingga manajemen data, manajemen responsip, peringatan dini dan monitoring sampai dengan pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Gambar 9. Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana



Sistem informasi kebencanaan tersebut di olah dan dikelola oleh Pusat Pengendalian Data dan Operasi BPBD Kab. Tanah Laut yang di pimpin oleh seorang Manager yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana yang bertugas melakukan perhitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan yang timbul diakibatkan bencana sepanjang tahun 2025.

Gambar 10. Pelaksanaan Pendataan Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana.



Sesuai dengan dokumen Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Kab. Tanah Laut 2025 tercatat kerusakan yang ditimbulkan sebesar Rp. 92.958.291.673, kerusakan sebesar Rp. 14.131.080.000, dan kebutuhan sebesar Rp. 122.515.251.673. Perhitungan besaran tersebut Berdasarkan dari analisa kerusakan dan kerugian serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat pasca bencana itu terjadi meliputi lima sektor yaitu sektor permukiman, insfratuktur, ekonomi produktif, Sektor Sosial dan Lintas Sektor. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan untuk dilakukan Rehabilitasi dan rekontruksi Pasca bencana Hidrometeorologi pada tahun 2025 di kabupaten Tanah Laut. Adapun rincian lima sektor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Nilai Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana

No	Sektor/ Sub Sektor	Nilai Kerusakan (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)	Kerusakan dan Kerugian (Rp)	Nilai kebutuhan (Rp)
1	Perumahan	21.058.255.750	14.107.020.000	35.165.275.750	50.565.275.750
2	Infrastruktur	64.969.397.185	15.900.000	65.011.177.185	65.011.177.185
3	Ekonomi Produktif	6.930.638.738	-	6.930.638.738	6.930.638.738
4	Sosial	-	6.720.000	6.720.000	6.720.000
5	Lintas Sektor	-	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	Grand Total	92.958.291.673	14.131.080.000	107.089.371.673	122.515.251.673

Bersarkah data tersebut pada tahun 2026 BPBD Kab. Tanah Laut akan melakukan koordinasi penanganan pasca bencana agar

nantinya SKPD yang memiliki kewenangan terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat melaksanakan pemulihan.

4. Faktor Penghambat/Kegagalan

Pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut pada saat masa darurat sudah dapat tertangani sepenuhnya sehingga tidak terdapat korban jiwa pada saat bencana terjadi, akan tetapi secara penilaian tingkat kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengelola, dan pulih dari berbagai potensi ancaman, baik di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya masih dijumpai berbagai hambatan yang menyebabkan pencapaian IKD belum mencapai target yang diharapkan, hambatan tersebut bersifat multidimensional dan saling berkaitan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, hingga lemahnya integrasi kebijakan pembangunan dengan aspek ketahanan daerah. Selain itu, dinamika perubahan sosial, tekanan ekonomi, serta kerentanan terhadap bencana dan gangguan keamanan juga turut memperbesar tantangan dalam meningkatkan nilai IKD.

Berikut adalah 25 indikator dari 71 indikator penilaian indeks ketahanan daerah yang tidak terpenuhi antara lain :

1. Belum disusunnya peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belum membentuk Forum PRB
3. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan yang belum sesuai dengan standart minimal kebutuhan.
4. Laporan pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik tidak diselenggarakan secara periodik.
5. Belum tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
6. Belum tersediannya informasi penataan ruang yang mudah diakses publik.
7. Belum tersedianya laporan restorasi sungai.
8. Belum adanya kegiatan penguatan lereng.
9. Belum adanya penerapan bangunan tahan gempabumi.

10. Belum tersedianya laporan revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota.
11. Belum tersedianya Rencana Kontijensi Gempabumi
12. Belum tersedianya Rencana Kontijensi Tsunami
13. Belum tersedianya Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
14. Belum tersedianya Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
15. Belum tersedianya Rencana kontijensi tanah longsor
16. Belum tersedianya Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
17. Belum tersedianya Sistem peringatan dini bencana karlahut
18. Belum tersedianya Rencana kontijensi erupsi gunungapi
19. Belum tersedianya Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi
20. Belum tersedianya Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
21. Belum tersedianya Rencana kontijensi kekeringan
22. Belum tersedianya Sistem peringatan dini bencana kekeringan
23. Belum tersedianya Rencana kontijensi banjir bandang
24. Belum tersedianya Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
25. Belum tersedianya Penghentian status Tanggap Darurat, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2025 belum ada penetapan status tanggap darurat.

5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah, Pemerintah Daerah telah mengambil berbagai langkah strategis yang berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah, masyarakat, serta sistem penanganan bencana secara menyeluruh. Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap tantangan kerawanan bencana yang terus berkembang, serta sebagai bentuk komitmen daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, berbagai alternatif solusi telah dirumuskan dan diimplementasikan untuk menjawab ketimpangan kapasitas, memperbaiki kualitas layanan, serta memastikan tersedianya mekanisme mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih optimal. Solusi-solusi tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan pascabencana, tetapi juga menekankan pencegahan, pengurangan risiko, serta peningkatan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi ancaman bencana.

Melalui serangkaian langkah yang telah ditempuh tersebut, pemerintah daerah berupaya memperkuat fondasi ketahanan wilayah, meningkatkan efektivitas layanan penanggulangan bencana, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih tangguh terhadap risiko bencana. Adapun langkah yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam upaya meningkatkan indeks ketahanan daerah adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelaksanaan Teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana amanat Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Membentuk Forum Pengurangan Bencana.
3. Membuat Standart Oprasional Prosedur manajemen logistik dan peralatan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan Kajian Risiko Bencana.
5. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap wilayah rawan bencana untuk membentuk desa tangguh bencana.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 6.660.856.827,45 dan terealisasi sebesar Rp. 5.653.007.117,00 atau 84,87% yang terdiri dari :

a) Belanja Operasi

Belanja operasi sebesar Rp. 6.258.399.753,90 yang terdiri dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.203.034.964,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.055.364.789,90 dan belanja modal sebesar Rp. 402.457.073,55.

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp. 2.865.611.699,00 dan Rp. 2.535.681.344,00. Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.

325.945.535,00 atau sebesar 14,75% dari tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Belanja Pegawai 2025

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.727.945.281,02	1.542.598.964,00	89,27	1.358.121.480,00	14%
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.475.089.682,98	1.323.012.735,00	89,69	1.177.559.864,00	12%
	Jumlah	3.203.034.964,00	2.865.611.699,00	89,47	2.535.681.344,00	13%

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp. 2.403.944.419,00 dan Rp. 2.621.322.260,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 217.377.841,00 atau sebesar -8% dari tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2025

No	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	616.097.603,90	460.370.256,00	74,72	406.964.898,00	13%
2	Belanja Jasa Kantor	1.258.660.000,00	991.678.951,00	78,79	1.070.044.465,00	-7%
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	66.567.240,00	51.787.260,00	77,80	54.308.292,00	-5%
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.325.000,00	4.000.000,00	24,50	0,00	#DIV/0!
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.325.000,00	4.000.000,00	24,50	0,00	#DIV/0!
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.827.500,00	3.000.000,00	33,98	0,00	#DIV/0!
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	290.000.000,00	286.968.000,00	98,95	0,00	#DIV/0!
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	190.000.000,00	60.000.000,00	31,58	60.000.000,00	0%
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	328.250.000,00	325.839.469,00	99,27	403.589.967,00	-19%
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	280.306.000,00	220.002.483,00	78,49	623.800.638,00	-65%

No	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
	Jumlah	3.055.364.789,90	2.403.944.419,00	78,68	2.621.322.260,00	-8%

b) Belanja Modal

Belanja Modal untuk tahun 2024 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 402.457.073,55. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp. 383.450.999,00 dan Rp. 108.070.000,00. Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(60)
2	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	92.829.295,56	85.159.999,00	91,74	0,00	0
4	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	5.059.530,00	5.000.000,00	98,82	0,00	#DIV/0!
5	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0
6	Belanja Modal Mebel	15.096.000,00	13.600.000,00	90,09	0,00	
7	Belanja Modal Alat Pembersih	0	0	0	8.800.000,00	0
8	Belanja Modal Personal Computer	54.290.460,75	48.700.000,00	89,70	18.300.000,00	166%
9	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0	0	13.940.000,00	0
10	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	203.213.787,24	199.911.000,00	98,37	2.960.000,00	6654%
11	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	31.968.000,00	31.080.000,00	97,22	4.270.000,00	628%
	Jumlah	402.457.073,55	383.450.999,00	95,28	108.070.000,00	255%

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 6.660.856.827,45 dari anggaran tersebut telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program yang terdiri atas 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Dari semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah terealisasi dengan baik, Realisasi menurut sasaran dan Program tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 11.998.945,71 terealisasi sebesar Rp. 10.190.904,00 atau 84,93% dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.999.287,04 terealisasi sebesar Rp. 5.950.416,00 atau 85,01%
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.999.658,67 terealisasi sebesar Rp. 4.240.488,00 atau 84,82%
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.208.034.548,65 terealisasi sebesar Rp. 2.869.705.699,00 atau 89,45% dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 3.203.034.964,00 terealisasi sebesar Rp. 2.865.611.699,00 atau 87,47%
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.999.584,65 terealisasi sebesar Rp. 4.094.000,00 atau 81,89%
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,00 atau 100%
- d) Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 311.447.376,62 terealisasi sebesar Rp. 282.430.144,00 atau 90,68% dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 5.544.304,59 terealisasi sebesar Rp. 4.002.000,00 atau 72,81%
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 82.563.407,88 terealisasi sebesar Rp. 72.663.953,00 atau 88,01%
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 6.764.195,70 terealisasi sebesar Rp. 5.230.000,00 atau 77,32%
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penganggunaan dengan anggaran sebesar Rp. 14.999.945,71 terealisasi sebesar Rp. 13.309.208,00 atau 88,73%
- 5) Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran sebesar Rp. 17.979.832,74 terealisasi sebesar Rp. 17.670.000,00 atau 98,28%
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 183.145.000,00 terealisasi sebesar Rp. 169.134.983,00 atau 92,35%
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 450.690,00 terealisasi sebesar Rp. 420.000,00 atau 93,19%
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 316.530.058,80 terealisasi sebesar Rp. 303.968.999,00 atau 96,03% dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 15.096.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.600.000,00 atau 90,09%
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 301.434.058,80 terealisasi sebesar Rp. 290.368.999,00 atau 96,33%
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.032.167.240,00 terealisasi sebesar Rp. 845.906.211,00 atau 81,95% dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 68.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 35.118.951,00 atau 51,65%

- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 964.167.240,00 terealisasi sebesar Rp. 810.787.260,00 atau 84,09%
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 388.231.600,00 terealisasi sebesar Rp. 385.759.469,00 99,36% dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 37.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 37.497.000,00 atau 99,99%
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 275.981.600,00 terealisasi sebesar Rp. 275.806.643,00 atau 99,94%
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 74.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 72.455.826,00 atau 96,93%
- h) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan anggaran sebesar Rp. 72.743.452,01 terealisasi sebesar Rp. 69.504.000,00 atau 95,55% dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- i) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 769.924.579,37 terealisasi sebesar Rp. 493.478.270,00 atau 64,09% dengan Sub Kegiatan:
- 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 66.029.704,04 terealisasi sebesar Rp. 57.365.800,00 atau 86,88%
 - 2) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 191.886.199,30 terealisasi sebesar Rp. 190.655.000,00 atau 99,36%
 - 3) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp. 59.825.572,11 terealisasi sebesar Rp. 55.372.970,00 atau 92,56%

- 4) Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 101.391.142,00 terealisasi sebesar Rp. 99.336.000,00 atau 97,97%
- 5) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 243.557.112,03 terealisasi sebesar Rp. 00,00 atau 0%
- 6) Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan anggaran sebesar Rp. 55.297.977,49 terealisasi sebesar Rp. 51.088.500,00 atau 92,39%
- 7) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 51.936.872,40 terealisasi sebesar Rp. 39.660.000,00 atau 76,36%
- j) Kegiatan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 336.948.257,54 terealisasi sebesar Rp. 223.435.500,00 atau 66,31% dengan sub kegiatan :
 - 1) Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 154.347.610,00 terealisasi sebesar Rp. 77.715.000,00 atau 50,35%
 - 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 99.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 76.950.000,00 atau 77,73%
 - 3) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 83.600.647,54 terealisasi sebesar Rp. 68.770.500,00 atau 82,26%
- k) kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp. 152.830.768,75 dan terealisasi sebesar Rp. 108.627.921,00 atau sebesar 71,08%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 14.349.028,48 terealisasi sebesar Rp. 1.403.365,00 atau 9,78%
 - 2) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 35.852.380,98 terealisasi sebesar Rp. 29.667.556,00 atau 82,75%

- 3) Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 10.533.622,68 terealisasi sebesar Rp. 7.275.000,00 atau 69,09%
- 4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 35.288.148,51 terealisasi sebesar Rp. 31.665.000,00 atau 89,73%
- 5) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 56.807.588,10 terealisasi sebesar Rp. 38.617.000,00 atau 67,98%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun kesatu terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap 1 Sasaran yaitu Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Daerah yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 65,67% dengan dengan tingkat capaian kinerja berkategori Baik. Anggaran yang terealisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar 84,87% sehingga terdapat efesiensi kinerja sebesar -29,24 %, dimana angka tersebut diperoleh dari Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Berbagai hambatan yang muncul sehingga menyebabkan pencapaian IKD belum mencapai target yang diharapkan, hambatan tersebut bersifat multidimensional dan saling berkaitan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, hingga lemahnya integrasi kebijakan pembangunan dengan aspek ketahanan daerah. Selain itu, dinamika perubahan sosial, tekanan ekonomi, serta kerentanan terhadap bencana dan gangguan keamanan juga turut memperbesar tantangan dalam meningkatkan nilai IKD

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Menyusun Kajian Risiko Bencana sebagai dasar pelaksanaan penanggulanga bencana khususnya pada tahap pra bencana.
2. Melakukan penyesuaian kelembagaan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan peraturan terbaru terkait penyusunan struktur organisasi tata kelola penanggulangan bencana.
3. Melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana berbasis keahlian mulai dari Tim Reaksi Cepat Kabupaten,sampai dengan aparaturn penanggulangan bencana pada tingkat desa.
4. Legalisasi kajian dan rencana penanggulangan becana serta melakukan koordinasi kepada unsur terkait agara rencana penanggulangan bencana dapat dilaksanakan.

Pelaihari, 2 Februari 2026

Kepala Pelaksana

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut,**



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt



LAMPIRAN



CAPAIAN SELURUH PEJABAT STRUKTURAL

**DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepala Pelaksana BPBD					
1	Terwujudnya kualitas ketahanan daerah atas bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,67	0,44	65,67%
Sekretaris BPBD					
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	75,05 Nilai	88,29%
2	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*)	100%	100%	100%
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
9	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
11	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	23 Orang/bulan	92%
12	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian
13	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	100%
14	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
15	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
16	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
17	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
18	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
19	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
20	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
21	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	100%
22	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	100%
23	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
24	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
25	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
26	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian
27	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit	100%
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan					
1	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana	50%	50%	100%
2	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Persentase capaian Pelayanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Tanah Laut	100%	84,47%	84,47%
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	0%	0%
4	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	468 Orang	433 Orang	92,5%
5	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	400 Orang	447 Orang	111%
6	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	48 Keluarga	48 Keluarga	100%
7	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian
8	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	23 Orang	0 Orang	0%
9	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
11	- (Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	33 Kawasan	59 Kawasan	178%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik					
1	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Persentase korban bencana yang terintegrasi sesuai standart/SOP tanggap darurat tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Meningkatnya ketepatan penetapan status kejadian bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%
3	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
4	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	550 Orang	1.138 Orang	206%
5	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	1.138 Orang	1138%
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi					
1	Meningkatnya daerah yang dipulihkan pasca bencana	Persentase Daerah yang dipulihkan pasca bencana	100%	0%	0%
2	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan pasca bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	0%	0%
3	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	21 Kegiatan	0 Kegiatan	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	10 Lembaga	10 Lembaga	100%
7	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pelaihari, 2 Februari 2026

Kepala Pelaksana

BPPD Kabupaten Tanah Laut,



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt

NIP. 19820929 201406 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISWAN AKBAR, S.SOS

Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt

Jabatan : Kepala Pelaksana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 198209292014061002

PIHAK PERTAMA

RISWAN AKBAR, S.SOS
NIP 198205012007011007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya daerah yang dipulihkan pasca bencana (PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA)	Persentase Daerah yang dipulihkan pasca bencana	100 %
2	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan pasca bencana (Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana)	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen
3	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen
4	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan (Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan)	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen
5	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota (Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota)	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	21 Kegiatan

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota (Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota)	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	10 Lembaga
7	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota)	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.332.447.057
	Kegiatan	
2	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	152.830.769
	Sub Kegiatan	
3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	14.349.028
4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	35.852.381
5	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	10.533.623
6	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	35.288.149

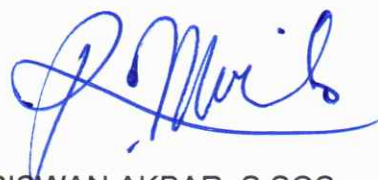
No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
7	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	56.807.588

Kepala Pelaksana BPBD



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 198209292014061002

TANAH LAUT, 2 September 2025
Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi



RISWAN AKBAR, S.SOS
NIP 198205012007011007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISWAN AKBAR, S.SOS

Jabatan : Plt. Kasi Kedaruratan dan Logistik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt

Jabatan : Kepala Pelaksana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 198209292014061002

RISWAN AKBAR, S.SOS
NIP 198205012007011007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kedaruratan Bencana (PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA)	Persentase korban bencana yang terintegrasi sesuai standart/SOP tanggap darurat tepat Waktu	100
2	Meningkatnya ketepatan penetapan status kejadian bencana (Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana)	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persentase
3	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam (Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen
4	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman (Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota)	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	550 Orang
5	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.332.447.057
	Kegiatan	
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	336.948.258
	Sub Kegiatan	
3	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	154.347.610
4	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	99.000.000
5	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	83.600.648

TANAH LAUT, 2 September 2025

Kepala Pelaksana BPBD

Plt. Kasi Kedaruratan dan Logistik



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 198209292014061002



RISWAN AKBAR, S.SOS
NIP 198205012007011007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAKTI PURWANTO, ST

Jabatan : Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt

Jabatan : Kepala Pelaksana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 198209292014061002

PIHAK PERTAMA

BAKTI PURWANTO, ST
NIP 198006082010011010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA)	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana	50
2	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana (Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota)	Persentase capaian Pelayanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Tanah Laut	100 Persentase
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana (Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana)	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Persentase
4	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota (Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana))	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	468 Orang
5	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	400 Orang

	rawan bencana (Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota)		
6	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	48 Keluarga
7	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana (Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan
8	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota)	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	23 Orang
9	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal (Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen
10	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal (Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota)	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen
11	- (Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang	33 Kawasan

		mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.332.447.057
	Kegiatan	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	72.743.452
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	769.924.578
	Sub Kegiatan	
4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	72.743.452
5	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	51.936.872
6	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	59.825.572
7	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	55.297.977
8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	243.557.112
9	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	101.391.142
10	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	191.886.199
11	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	66.029.704

TANAH LAUT, 2 September 2025

Kepala Pelaksana BPBD

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 198209292014061002

BAKTI PURWANTO, ST
NIP 198006082010011010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512) (21300) Pelaihari Kode Pos 70814

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DODY SAPUTRA, S.STP, M.A

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt

Jabatan : Kepala Pelaksana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 198209292014061002

PIHAK PERTAMA

DODY SAPUTRA, S.STP, M.A
NIP 199312282015071001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen
..	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Persen
2	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 0
5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
	Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)		
6	- (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*)	100 %
7	- (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
8	- (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
9	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	7
10	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
11	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan
12	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen
13	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
14	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)		
15	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
16	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
17	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
18	Tersedianya Bahan/Material (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
19	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
20	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
21	Tersedianya Mebel (Pengadaan Mebel)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit
22	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit
23	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
24	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
25	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
26	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit
27	- (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.328.409.772
	Kegiatan	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.998.946
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.208.034.549
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.447.378
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	316.530.059
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.032.167.240
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.231.600
	Sub Kegiatan	
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.999.287
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.659
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.203.034.964
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.585
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.544.305
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.563.408
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.764.196
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.946
18	Penyediaan Bahan/Material	17.979.833
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.145.000
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450.690
21	Pengadaan Mebel	15.096.000
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	301.434.059
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.000.000
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	964.167.240
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.981.600

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.750.000

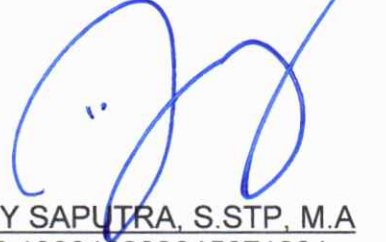
TANAH LAUT, 2 September 2025

Kepala Pelaksana BPBD



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 198209292014061002

Sekretaris



DODY SAPUTRA, S.STP, M.A
NIP 199312282015071001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASPI SETIA RAHMAN, S.PT

Jabatan : Kepala Pelaksana

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. RAHMAT TRIANTO

ASPI SETIA RAHMAN, S.PT
NIP. 198209292014061002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sasaran		
1	Terwujudnya kualitas ketahanan daerah atas bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,67 Nilai
2	--	-	-

	Program	Anggaran
	Program	
1	Program Penanggulangan Bencana	1.332.447.057
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.328.409.772

TANAH LAUT, 2 September 2025

Bupati TANAH LAUT

Kepala Pelaksana BPBD



H. RAHMAT TRIANTO



ASPI SETIA RAHMAN, S.PT
NIP. 198209292014061002



SK INDIKATOR KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 45)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 13 Agustus 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kab. Tanah Laut



★ **ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt**
Penata Tk.I (III/d)
NIP 19820929 201406 1 002

Tembusan Yth:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 22 Tahun 2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

- Kabupaten : Tanah Laut
- Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebencanaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebencanaan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang kebencanaan, baik pra bencana, tanggap darurat bencana, paska bencana, serta penanganan pengungsi secara cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan
c. Pembinaan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksana teknis kebencanaan.
d. Pengelolaan urusan kesekretariatan

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Terwujudnya kualitas ketahanan daerah atas bencana	1 Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan Upaya untuk mengukur kapasitas (ketahanan) penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Nilai Indeks Ketahanan Daerah berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Semakin tinggi nilai IKD, makin tinggi pula kapasitas yang dimiliki sebuah daerah dan otomatis menekan skor IRBI. IKD dihitung berdasarkan capaian 71 indikator ketahanan daerah pada 7 sektor.	BNPB

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kab. Tanah Laut


ASEP SETIA RAHMAN, S.Pt
Penata Tk.I (III/d)
NIP 19820929 201406 1 002



RENCANA AKSI

TAHUN 2025

RENCANA AKSI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
	Terwujudnya kualitas ketahanan daerah atas bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,67						5.709.661.588	1.119.944.370	20%	0	1.119.944.350	20%	0	1.119.944.350	20%	0	2.349.828.518	41%	0,67	
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85	2.765.395.141	691.348.792	25%	0	691.348.783	25%	0	691.348.783	25%	0	691.348.783	25%	85	
							Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah		100	1.706.432.893	397.624.913	23%	0	397.624.905	23%	0	397.624.905	23%	0	513.558.170	30%	100	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	11.998.946	2.999.741	25%	25	2.999.735	25%	25	2.999.735	25%	25	2.999.735	25%	25	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)		7	6.999.287	1.749.824,00	25%	3	1.749.821,00	25%	1	1.749.821,00	25%	2	1.749.821,00	25%	1	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	4.999.659	1.249.917,00	25%	3	1.249.914,00	25%	1	1.249.914,00	25%	1	1.249.914,00	25%	1	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	2.753.396.195	688.349.051	25%	25	688.349.048	25%	25	688.349.048	25%	25	688.349.048	25%	25	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	2.748.396.610	687.099.154,00	25%	25	687.099.152,00	25%	25	687.099.152,00	25%	25	687.099.152,00	25%	25	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	4.999.585	1.249.897,00	25%	1	1.249.896,00	25%	1	1.249.896,00	25%	1	1.249.896,00	25%	2	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	100	60.000.000	15.000.000	25%	25	15.000.000	25%	25	15.000.000	25%	25	15.000.000	25%	25	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	60.000.000	15.000.000,00	25%	3	15.000.000,00	25%	3	15.000.000,00	25%	3	15.000.000,00	25%	1	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	221.131.388	28.246.603	13%	25	28.246.595	13%	25	28.246.595	13%	25	136.391.595	62%	25	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.544.305	1.386.077,00	25%	1	1.386.076,00	25%	1	1.386.076,00	25%	1	1.386.076,00	25%	1	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	70.227.251	17.556.815,00	25%	3	17.556.812,00	25%	3	17.556.812,00	25%	3	17.556.812,00	25%	3	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	6.764.196	1.691.049,00	25%	1	1.691.049,00	25%	1	1.691.049,00	25%	1	1.691.049,00	25%	1	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	14.999.946	3.749.988,00	25%	2	3.749.986,00	25%	2	3.749.986,00	25%	2	3.749.986,00	25%	2	
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	3.750.000,00	25%	2	3.750.000,00	25%	2	3.750.000,00	25%	2	3.750.000,00	25%	2	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	108.145.000	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	108.145.000,00	100%	3	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	450.690	112.674,00	25%	0	112.672,00	25%	0	112.672,00	25%	0	112.672,00	25%	1	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*)	%	100	22.884.265	3.774.000	16%	25	3.774.000	16%	25	3.774.000	16%	25	11.562.265	51%	25	
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	16	15.096.000	3.774.000,00	25%	4	3.774.000,00	25%	4	3.774.000,00	25%	4	3.774.000,00	25%	4	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.788.265	-	0%		-	0%		-	0%		7.788.265,00	100%	1	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.022.167.240	255.541.810	25%	25	255.541.810	25%	25	255.541.810	25%	25	255.541.810	25%	25	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	58.000.000	14.500.000,00	25%	3	14.500.000,00	25%	3	14.500.000,00	25%	3	14.500.000,00	25%	3	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	964.167.240	241.041.810,00	25%	3	241.041.810,00	25%	3	241.041.810,00	25%	3	241.041.810,00	25%	3	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	380.250.000	95.062.500	25%	25	95.062.500	25%	25	95.062.500	25%	25	95.062.500	25%	25	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37.500.000	9.375.000,00	25%	1	9.375.000,00	25%	1	9.375.000,00	25%	1	9.375.000,00	25%	1	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	268.000.000	67.000.000,00	25%	18	67.000.000,00	25%	18	67.000.000,00	25%	18	67.000.000,00	25%	18	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	74.750.000	18.687.500,00	25%	32	18.687.500,00	25%	32	18.687.500,00	25%	32	18.687.500,00	25%	32	
	Terwujudnya kualitas ketahanan daerah atas bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,67	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Daerah yang dipulihkan pasca bencana	%	100	149.205.769	6.220.665	4%	0	6.220.662	4%	0	6.220.662	4%	0	130.543.780	87%	100	
							Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana		50	709.309.527	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	709.309.527	100%	50	
							Persentase korban bencana yang terintegrasi sesuai standart/SOP tanggap darurat tepat Waktu		100	379.318.258	24.750.000	7%	100	24.750.000	7%	100	24.750.000	7%	100	305.068.258	80%	100	
						Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pelayanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Tanah Laut	Persentase	100	42.395.452	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	42.395.452	100%	100	
						Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	468	42.395.452	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	42.395.452,00	100%	468	
						Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase	100	666.914.075	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	666.914.075	100%	100	
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	400	51.936.872	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	51.936.872,00	100%	400	
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	48	61.205.572	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	61.205.572,00	100%	48	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	2	55.297.977	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	55.297.977,00	100%	2	
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	23	139.166.609	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	139.166.609,00	100%	23	
						Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	101.391.142	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	101.391.142,00	100%	1	
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	191.886.199	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	191.886.199,00	100%	1	
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	33	66.029.704	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	66.029.704,00	100%	33	
						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase	100	379.318.258	24.750.000	7%		24.750.000	7%		24.750.000	7%		305.068.258	80%		
						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2	196.717.610	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	196.717.610,00	100%	2	
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	550	99.000.000	24.750.000,00	25%	125	24.750.000,00	25%	125	24.750.000,00	25%	125	24.750.000,00	25%	175	
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100	83.600.648	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	83.600.648,00	100%	100	
						Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	100	149.205.769	6.220.665	4%	0	6.220.662	4%	0	6.220.662	4%	0	130.543.780	87%	100	
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	14.349.028	3.587.257,00	25%	0	3.587.257,00	25%	0	3.587.257,00	25%	0	3.587.257,00	25%	1	
						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1	35.902.381	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	35.902.381,00	100%	1	
						Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	21	10.533.623	2.633.408,00	25%	7	2.633.405,00	25%	7	2.633.405,00	25%	4	2.633.405,00	25%	3	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
						Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	10	35.288.149	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	35.288.149,00	100%	1	
						Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	53.132.588	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	53.132.588,00	100%	1	

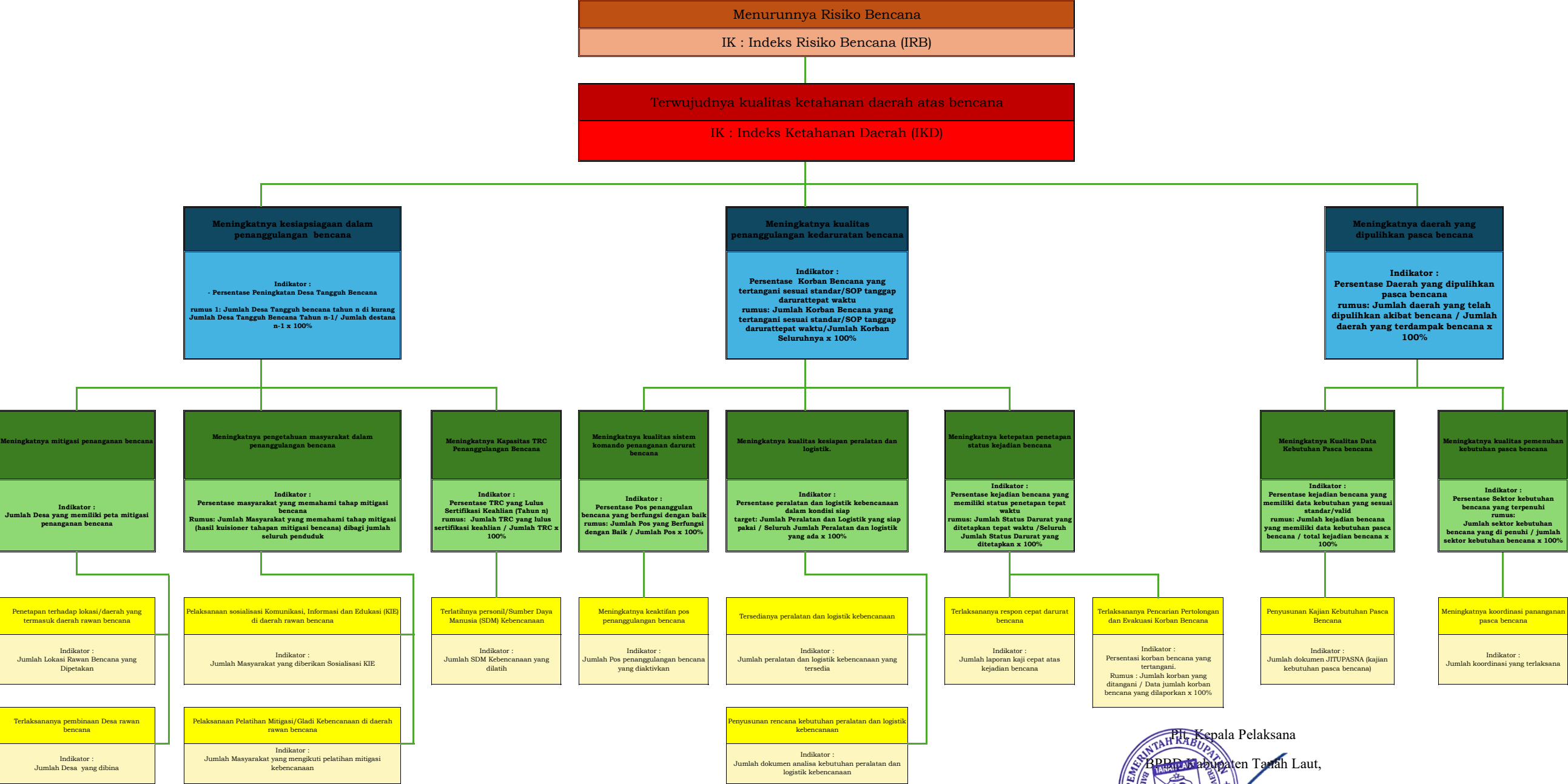




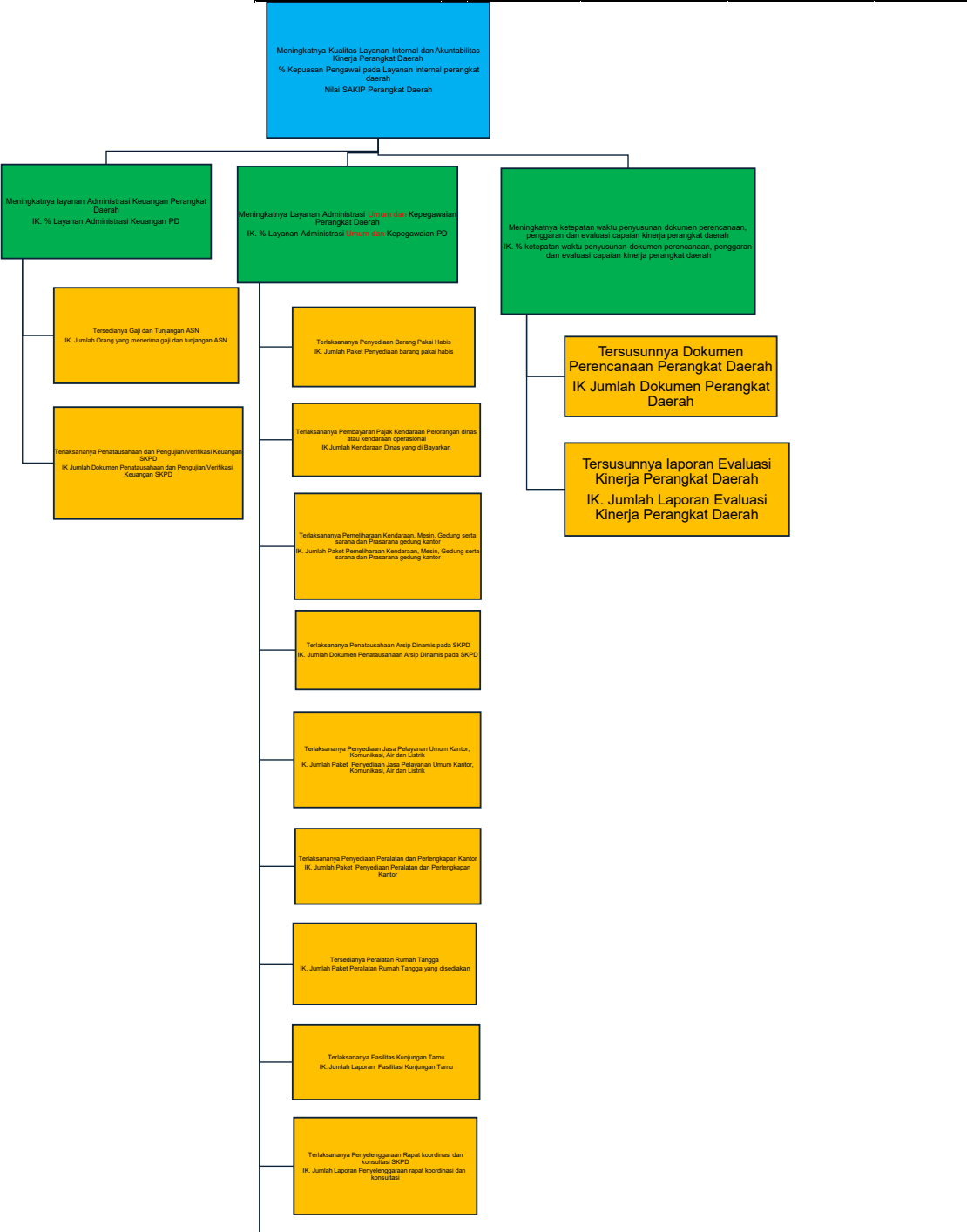
POHON KINERJA

BAGAN POHON KINERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



Pt. Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Tanah Laut,
ASPI SETA RAHMAN, S.Pt
NIP. 19820929 201406 1 002



Plt. Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Tanah Laut,
ASRI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 19820929 201406 1 002



CASCADING KINERJA

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Menurunnya Risiko Bencana				Indeks Risiko Bencana (IRB)		
		Terwujudnya kualitas ketahanan daerah atas bencana			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		Kepala Pelaksana BPBD
			Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana		Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Persentase masyarakat yang memahami tahap mitigasi bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kot	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah Masyarakat yang diberikan Sosialisasi KIE	Sosialisasi, Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE) Relawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	
				Meningkatnya mitigasi penanggulangan bencana	Jumlah Desa yang memiliki peta mitigasi penanganan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				Meningkatnya Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana	Persentase TRC yang Lulus Sertifikasi Keahlian (Tahun n)		
				Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kab/Kotuntuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
				Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kab/Kotyang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknisd an Manajerialnya	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kab/Kot(per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Penyusunan Rencana Kontinjensi	
				Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kotyang diikuti leh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kab/Kotyang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
				Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kab/Kot	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kab/Kotyang tertangani	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Penanggulangan Bencana (RPB) Kab/Kotyang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kab/Kotsampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kot	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kot	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
				Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas penanggulangan kedaruratan bencana		Persentase Korban Bencana yang tertangani sesuai standar/SOP tanggap darurat tepat waktu	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
				Meningkatnya kualitas sistem komando penanganan darurat bencana	Persentase Pos penanggulan bencana yang berfungsi dengan baik	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
				Meningkatnya kualitas kesiapan peralatan dan logistik.	Persentase peralatan dan logistik kebencanaan dalam kondisi siap		
				Meningkatnya ketepatan penetapan status kejadian bencana	Persentase kejadian bencana yang memiliki status penetapan tepat waktu		
				Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kab/Kot	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			Meningkatnya daerah yang dipulihkan pasca bencana		Persentase daerah yang dipulihkan pasca bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
				Meningkatnya Kualitas Data Kebutuhan Pasca bencana	Persentase Data Kejadian Bencana yang divalidasi	Penataan Sisitem Dasar Penanggulangan Bencana	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
				Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan pasca bencana	Persentase Sektor kebutuhan bencana yang terpenuhi		
				Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
				Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Aparatur BPBD Kab/Kot dan lintas perangkat daerah Kab/Kot yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kab/Kot dan lintas perangkat daerah Kab/Kot yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kab/Kot	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Keterangan
				Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kot sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kot	
				Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kab/Kot	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kot yang dilegal	Koordinasi penanganan Pascabencana Kab/Kot	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kab/Kot meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kab/Kot	
				Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
				Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan Sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	


 Kepala Pelaksana
 BPBD Kabupaten Tanah Laut,
ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
 NIP. 19820929 201406 1 002



LHE AKIP TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 9 September 2025

Kepada Yth.

Kepala SKPD Wilayah Irban IV

(daftar terlampir)

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 700.1.2.1/157/INSP/IX/2025

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 (SKPD Wilayah Irban IV)	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan selanjutnya

Inspektur,



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Daftar SKPD Penerima Surat :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut
9. Camat Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut
10. Camat Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
11. Camat Takisung Kabupaten Tanah Laut



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512)22384
Pelaihari

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/219/LHE AKIP/Insp/ 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2025

Yth. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut
di-

Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan;
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja

- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
- b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
- b. Renja SKPD tahun 2025;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
- f. *Cascading*;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja tahun 2024;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/324/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).

2	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 75,05 dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun	
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	23,70	23,10
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	21,30
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	10,65
d. Evaluasi Internal	25,00	18,75	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		78,45	75,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan perencanaan kinerja secara memadai, ditandai dengan dokumen perencanaan kinerja telah tersusun dengan baik, dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat catatan yang masih perlu diperbaiki yaitu belum Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, hal ini terlihat dengan belum

dilaksanakannya evaluasi terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya dalam rangka menyusun rencana kinerja tahun 2025

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **21,30** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Pemantauan kinerja hanya menggambarkan besaran realisasi keuangan, sedangkan evaluasi terhadap hasil kinerja belum dilaksanakan.
- 2) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik (feedback) dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya, hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,65** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada komponen pelaporan kinerja terdapat catatan bahwa Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, ini terlihat pada dokumen renstra tahun 2025-2029 yang mengungkapkan bahwa baseline SDM TRC BPBD yang tersertifikasi adalah 20% padahal capaian dalam dokumen laporan kinerja tahun 2024 adalah 0%

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Pada Komponen evaluasi internal terdapat catatan bahwa target indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 50% dan capaian sebesar 0% dan Persentase SDM TRC BPBD yang tersertifikasi keahlian dalam penanggulangan bencana dengan target pada tahun 2024 sebesar 20% dan capaian sebesar 0%

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya secara menyeluruh serta mendokumentasikan hasil analisis faktor pendukung dan penghambat pencapaian, hasil evaluasi tersebut harus dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya, sehingga siklus manajemen kinerja berjalan secara berkesinambungan;

- b. Memperhatikan konsistensi penetapan target kinerja pada seluruh dokumen perencanaan, penetapan target harus didasarkan pada *baseline*, tren capaian, serta analisis yang objektif agar target yang ditetapkan bersifat *SMART* (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Selain itu, perlu dibangun mekanisme pengendalian internal agar tidak terjadi perbedaan angka target pada dokumen yang berbeda untuk tahun yang sama.
- c. Melaksanakan evaluasi kinerja yang tidak hanya berfokus pada realisasi keuangan tetapi juga pada pencapaian hasil (*outcome*) dari program/kegiatan.
- d. Pemanfaatan aplikasi E-Kinerja untuk mendorong pimpinan memberikan umpan balik (*feedback*) yang lebih komprehensif dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik sebaiknya berupa narasi analitis yang menjelaskan capaian kinerja pegawai, hambatan yang dihadapi, serta faktor pendukung keberhasilan dengan harapan pemantauan kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjadi sarana pembinaan kinerja bawahan
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu menyusun langkah perbaikan berupa evaluasi kinerja internal secara berkala untuk meningkatkan capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan khususnya persentase peningkatan jumlah desa tangguh bencana dan persentase SDM TRC BPBD yang tersertifikasi keahlian

✓ 7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.



Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)

NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Unit/ Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		23,10
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	B	10,50
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		21,30
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,80
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	C	4,50
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		10,65
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	CC	2,70
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,00

4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				75,05
KESIMPULAN				BB
INTERPRESTASI				Sangat Baik



Pt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

1. Belum Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya

tanahlaut.sakip.net/index.php?op=akuntabilitas&so=tampil kriteria&thn=2024&pel=1_13

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN RPMD	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN 2024	REMARKS
2.6.2	Regulasi kinerja telah mengintegrasikan penyusunan KPI/indikator dalam mendukung kinerja		Indeks ketahanan bencana	158,33	153,2	150,1
2.6.6	Regulasi kinerja telah mengintegrasikan penyusunan KPI/indikator dalam mendukung kinerja		Indeks ketahanan bencana	158,33	153,2	150,1
2.6.7	Regulasi kinerja telah mengintegrasikan penyusunan KPI/indikator dalam mendukung kinerja		Indeks ketahanan bencana	158,33	153,2	150,1

2. Penentuan target yang tidak konsisten antar tahun yaitu pada indikator Indeks ketahanan Daerah pada Dokumen Rencana Strategis 2024-2026 dimana target pada tahun 2026 adalah 0,60 sedangkan pada dokumen rancangan Rencana Strategis 2025-2029 target pada tahun 2026 adalah 0,67

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN RPMD		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				Realisasi 2022	Perkiraan 2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Indeks resiko bencana	158,33	153,2	150,1	147	144			
2	Meningkatkan ketahanan bencana	Meningkatkan Pemangku-pemangku Bencana (P2B)	Indeks ketahanan bencana	0,54	0,56	0,58	0,59	0,60			
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Kabupaten	8	65	70,61	75	80,01			
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP RPMD	79,00	80,00	80,01	81	81,00			

NO	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Indikator Kinerja Utama							
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75

NO	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Indikator Kinerja Utama							
1	Persentase jumlah tenaga tenaga yang terdampak oleh program pelayanan dan pelayanan publik	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	Persentase jumlah tenaga tenaga terdampak	Persentase	0	0	100	100	100	100

[illegible]

4. Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik (*feedback*) dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya, hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar

12

5. indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 50% dan capaian sebesar 0% dan Persentase SDM TRC BPBD yang tersertifikasi keahlian dalam penanggulangan bencana dengan target pada tahun 2024 sebesar 20% dan capaian sebesar 0%

Tanah Laut serta pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan dengan baik. Adapun sasaran kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana

Indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 50% dan capaian sebesar 0%

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2024 30

dan Persentase SDM TRC BPBD yang tersertifikasi keahlian dalam penanggulangan bencana dengan target pada tahun 2024 sebesar 20% dan capaian sebesar 0 %.

> Back to Page 37

Gambar 2.1. Peningkatan Wilayah Desa Tangguh

100% 111 111 111



Pt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)

NIP. 19770223 200604 2 009